



Sikap dan **Karakter** **Anti Korupsi**

Pertemuan 11

Egi Safitri

Refleksi:

- Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menanamkan sikap dan karakter anti korupsi sejak dini.



Mengapa anti korupsi penting?

Menciptakan Lingkungan yang Adil dan Setara

Korupsi menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan peluang. Dengan mengurangi korupsi, kita mendukung masyarakat yang lebih adil, di mana hak dan kewajiban setiap individu dihargai tanpa adanya privilese yang tidak adil.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menghalangi investasi dan menciptakan lingkungan bisnis yang tidak stabil. Dengan memerangi korupsi, kita menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Menjamin Kesejahteraan Masyarakat Secara Menyeluruh

Korupsi dapat merugikan pelayanan publik, pendidikan, dan sistem kesehatan. Dengan memastikan kebersihan dari korupsi, kita dapat memastikan bahwa pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat diperhatikan dan ditingkatkan.

Sikap anti Korupsi

- 1. Kesadaran akan Dampak Negatif Korupsi :** Sikap anti korupsi dimulai dengan kesadaran akan dampak negatif korupsi terhadap individu, masyarakat, dan negara. Ini melibatkan pemahaman bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga moral dan etik
- 2. Kepatuhan pada Nilai-Nilai Etika dan Moral:** Sikap anti korupsi membutuhkan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai etika dan moral dalam setiap tindakan dan keputusan. Integritas pribadi menjadi kunci dalam menjaga sikap ini.
- 3. Keberanian untuk Melaporkan Praktik Korupsi:** Menjadi bagian dari perubahan memerlukan keberanian untuk melaporkan praktik korupsi. Individu dengan sikap anti korupsi tidak hanya menolak terlibat dalam korupsi tetapi juga berani melaporkan tindakan korupsi yang mereka saksikan.

1

Integritas dan Kejujuran

- Integritas mengacu pada konsistensi dalam tindakan moral dan kejujuran dalam perilaku. Karakter anti korupsi dibangun di atas dasar integritas pribadi dan kejujuran dalam segala situasi.

2

Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

- Karakter anti korupsi mencakup tanggung jawab pribadi dan akuntabilitas terhadap tindakan. Individu yang memiliki karakter ini siap untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menerima konsekuensi dari keputusan yang diambil

3

Kedisiplinan dalam Menjalankan Tugas

- Kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mencegah terjerumus ke dalam praktik korupsi. Individu yang memiliki karakter anti korupsi menunjukkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas mereka tanpa melibatkan tindakan yang tidak etis.

Strategi Mengembangkan Sikap Anti Korupsi

Pendidikan dan Sosialisasi Anti Korupsi

Strategi ini melibatkan pendidikan masyarakat tentang konsekuensi negatif korupsi dan pentingnya integritas. Program pendidikan anti korupsi di sekolah, universitas, dan lembaga pelatihan dapat membentuk kesadaran dan sikap anti korupsi.

Membangun Budaya Organisasi yang Transparan

Membangun budaya organisasi yang transparan mencakup kebijakan yang mendukung keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana. Organisasi yang transparan menciptakan lingkungan di mana korupsi sulit berkembang.

Sanksi Tegas terhadap Pelaku Korupsi

Menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku korupsi adalah langkah penting untuk memberikan sinyal bahwa korupsi tidak akan ditoleransi. Hukuman yang berat dapat menjadi efektif sebagai deterrent dan memberikan efek jera.

Negara yang berhasil memerangi korupsi

Berdasarkan laporan indeks persepsi korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh **Transparency International** pada tahun 2023, terdapat beberapa negara yang berhasil memerangi korupsi dengan efektif. Negara-negara tersebut adalah:

- Denmark (skor 90)
- Finlandia (skor 89)
- Norwegia (skor 88)
- Selandia Baru (skor 87)
- Swedia (skor 86)



Mengapa?

Kebijakan dan regulasi yang kuat

Negara-negara tersebut memiliki kebijakan dan regulasi yang kuat untuk mencegah dan memberantas korupsi. Kebijakan dan regulasi tersebut mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, dan perlindungan terhadap whistle blower.

Masyarakat yang sadar antikorupsi

Masyarakat di negara-negara tersebut memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya antikorupsi. Masyarakat berperan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan melaporkan kasus korupsi kepada aparat penegak hukum.

Kerja sama antar lembaga

Lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah di negara-negara tersebut bekerja sama secara efektif dalam memerangi korupsi. Kerja sama tersebut dilakukan untuk berbagi informasi, sumber daya, dan keterampilan.

Tantangan dalam Memperkuat Sikap dan Karakter Anti Korupsi

Resistensi terhadap Perubahan

- Beberapa orang mungkin menentang perubahan menuju sikap dan karakter anti korupsi karena mereka dapat kehilangan keuntungan pribadi mereka. Strategi perubahan harus mencakup langkah-langkah untuk mengatasi resistensi dan membangun konsensus

Kesenjangan Kekayaan yang Besar

- Kesenjangan kekayaan yang besar dapat menciptakan ketidaksetaraan dan merangsang tindakan korupsi. Langkah-langkah kebijakan yang menangani kesenjangan ekonomi dapat membantu mengurangi insentif untuk terlibat dalam korupsi.

Kurangnya Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan

- Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat memberikan peluang bagi praktik korupsi. Peningkatan transparansi, seperti pengungkapan keuangan publik dan audit yang independen, dapat membantu memitigasi risiko korupsi



Langkah-Langkah Menuju Masyarakat Anti Korupsi

Melibatkan Seluruh Lapisan Masyarakat

- Melibatkan seluruh lapisan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Program-partisipasi, dialog terbuka, dan inisiatif keterlibatan masyarakat dapat membantu membangun konsensus dan dukungan untuk nilai-nilai anti korupsi.

Memperkuat Lembaga Pengawas dan Penegak Hukum

- Lembaga pengawas yang kuat dan penegakan hukum yang efektif merupakan elemen penting dalam pemberantasan korupsi. Investasi dalam peningkatan kapasitas dan independensi lembaga-lembaga ini dapat membantu menjamin penegakan hukum yang adil dan efektif.

"Sikap dan karakter anti korupsi adalah landasan penting menuju masyarakat yang adil, transparan, dan berkelanjutan."



Thank You

